



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUBIYO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3. NHK : 64670

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 8.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m²/200 m² di KARAWANG,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 551 m² di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/110 m² di KOTA JAKARTA
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1878 m²/220 m² di SUBANG, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 114.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 780.889.019

F. HARTA LAINNYA

Rp. 41.000.000

Sub Total

Rp. 8.956.889.019



III. HUTANG

Rp.

1.700.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.256.889.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.